

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan " Pengaruh Investasi, PDRB dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di D.I Yogyakarta " selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Pada variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didapatkan bahwa PMDN memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini dapat dikatakan bahwa jumlah PMDN lebih kecil setiap tahunnya dibandingkan dengan PMA. Dalam jumlah tersebut dapat menunjukkan bahwa PMDN kurang berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja di D.I Yogyakarta serta dapat mengindikasikan pula bahwa PMDN yang terserap pada sektor industri di D.I Yogyakarta lebih dialokasikan untuk proyek-proyek padat modal seperti pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung serta belanja barang modal untuk kebutuhan tahap awal produksi.
2. Pada variabel Penanaman Modal Asing (PMA) didapatkan bahwa PMA berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, pada dasarnya PMA itu penting guna untuk memperlancar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara disisi lain, PMA merupakan bentuk eksploitasi sumber daya baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam kenyataannya PMA mutlak dibutuhkan untuk

mengembangkan perekonomian di suatu wilayah, karena jika suatu daerah jauh dari PMA maka wilayah itu akan lebih cenderung tertinggal di dalam bentuk kemajuan baik itu dari segi teknologi maupun dari segi sosial budaya. Dengan demikian maka PMA juga akan membawa dampak baik bagi para pencari kerja yang ada di Provinsi D.I Yogyakarta.

3. Pada variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didapatkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh angka pembentuk PDRB tidak hanya dihasilkan dari penduduk yang bekerja saja melainkan juga dari faktor yang lain seperti keadaan perekonomian di D.I Yogyakarta, keadaan politik di D.I Yogyakarta, dsb. PDRB juga dapat menunjukkan produktifitas tenaga kerja itu sendiri. Ketika tingkat produktifitas rendah maka dapat terjadi kekurangan pasokan barang maupun jasa sehingga bisa menimbulkan inflasi dan menimbulkan keesuan.
4. Pada variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) didapatkan bahwa UMP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya pergeseran struktur perekonomian. Pengaruh pengangguran meningkat dikarenakan tidak adanya ketersediaan kesempatan kerja yang memadai sesuai dengan kriteria pencari kerja. Alasan lain yaitu tingginya proses migrasi penduduk di suatu daerah juga akan menimbulkan kesenjangan pengangguran di suatu daerah tertentu. Dengan adanya pengangguran maka pemerintah gencar untuk menambah

lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran tinggi dan penyerapan tenaga kerja juga tinggi.

5. Secara bersama-sama keempat variabel independen yang digunakan diatas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di D.I Yogyakarta dengan nilai probabilitas *F statistics* sebesar 0.000071 dimana hasil tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 10%. Nilai koefisien determinasi sebesar 0.894741, hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel independen memberikan sumbangan efektif sebesar 89% terhadap variasi atau perubahan variabel dependen, yaitu penyerapan tenaga kerja di D.I Yogyakarta.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya dapat dirumuskan beberapa saran berikut ini :

1. Pengaruh yang positif dan tidak signifikan pada variabel PMDN dapat dijadikan sebagai tantangan bagi D.I Yogyakarta untuk mengoptimalkan peningkatan PMDN dengan memberikan iklim investasi yang lebih kondusif lagi. Adapun beberapa caranya dengan melakukan efisiensi perijinan atau regulasi kebijakan di bidang investasi, jaminan hukum dan ketertiban berusaha, atau bahkan dapat juga dengan memberikan insentif atau tax holliday bagi investasi yang padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) melalui kebijakan menjaga stabilitas ekonomi,

politik dan keamanan dalam negeri, memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.

3. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta seharusnya lebih memperhatikan keadaan perekonomian dan keadaan politik yang terjadi di D.I Yogyakarta. Agar jumlah produktifitas yang dilakukan oleh penduduk D.I Yogyakarta meningkat sehingga jumlah barang yang di produksi juga akan meningkat serta kesempatan kerja yang tersedia juga akan meningkat.
4. Dengan lebih memperhatikan pengaruh upah minimum yang akan lebih dirasakan manfaatnya bagi para pekerja kerah putih, maka operasionalisasi kebijakan fiskal harus diarahkan kepada peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilannya agar dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja yang terdidik dan terampil, dimana mengingat lapangan kerja yang tersedia khususnya sektor formal pada saat ini lebih mengutamakan angkatan kerja yang terdidik dan terampil. Walaupun demikian pemerintah tidak perlu khawatir untuk menaikkan upah minimum karena dengan menaikkan upah minimum akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja ketika permintaan terhadap tenaga kerja meningkat.